



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

STASIUN PSDKP PONTIANAK

Nomor SOP	08.11/STA.4/SOP/OT.310/IX/2025
Tanggal Pembuatan	25 Juli 2023
Tanggal Revisi	1 September 2025
Tanggal Efektif	1 September 2025
Disahkan oleh	Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak
	 Bayu Yuniarto Suharto, S.St.Pl., M.Si. NIP. 19850616 200701 1 003
Nama SOP	Penanganan Sengketa Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik3 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.4 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan8 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan9 Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/ 2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan untuk mengelolah data dan informasi;2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik;3. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik;4. Mampu mendokumentasikan informasi;5. Mempunyai <i>communication skill</i>
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1 SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan2 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi3 SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi4 SOP Uji Konsekuensi5 SOP Pemutahiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik6 SOP Pendokumentasian Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Laptop/komputer2. Printer3. ATK4. Jaringan Internet4. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	<ol style="list-style-type: none">1. Buku Tamu/Agenda2. Daftar pemohon

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pelayanan Informasi	PPID	ATASAN PPID	Majelis Persidangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Surat panggilan dari Majelis Komisioner dan Mediator yang ditetapkan oleh KIP					Surat Panggilan	5 menit	Surat Panggilan	
2	Menganalisa permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon (materi permohonan/gugatan),					Surat Panggilan	5 menit	Surat panggilan, dokumen, materi persidangan, dokumentasi, recorder	
3	Menghadiri Persidangan					Surat panggilan, dokumen, materi persidangan, dokumentasi, recorder	1 hari	Hasil Putusan Sidang	Hasil putusan sidang dapat berupa: 1. Mengabulkan Permohonan informasi untuk disampaikan kepada pemohon 2. Menolak Permohonan informasi dari pemohon
4	Jika hasil putusan sidang mengabulkan pemohon, maka permohonan informasi dimaksud disampaikan kepada pemohon. Apabila, hasil putusan sidang menolak pemohon, maka permohonan informasi tidak disampaikan kepada pemohon					Hasil Putusan Sidang	14 hari kerja	Data dan informasi	
5	Jika hasil putusan sidang mengabulkan pemohon, maka menerima data dan informasi dari pemohon. Apabila, hasil putusan sidang menolak pemohon, maka data dan informasi tidak disampaikan kepada pemohon					Data dan informasi	14 hari kerja	Data dan informasi	